Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume. 4, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN :2988-134X ; p-ISSN :2988-148X; Hal. 130-141
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i4.3530
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Kondisi dan Model Ekonomi di Era Praislam

Lindawati[1*], Siti Jamilah[2], Dicky Maulana Zulkarnaen[3], Slamet Firdaus[4]
[1] Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia
[2] SMA Plus NU Panguragan Cirebon, Indonesia
[3,4] Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: lindawati9833@gmail.com[1], milhandanu@gmail.com[2], dickymaulanazulkarnaen@gmail.com[3], slamet.firgo@gmail.com[4]*

**Penulis Korespondensi: lindawati9833@gmail.com[1]*

Abstract*. Popular historiography often simplifies the pre-Islamic Arabian Peninsula as a static and isolated desert region labeled the "Age of Jahiliyyah." This study aims to deconstruct that narrative by examining the economic dynamics of ancient Arabia before the seventh century CE. Using a historical-qualitative approach and library research, the study analyzes the interaction among ecological variation, market institutional structures, and local cultural norms. The findings show that the pre-Islamic economy consisted of three heterogeneous but integrated economic models: pastoral-nomadic (inland Bedouin), oasis-agricultural (Yemen and Yathrib), and commercial-caravan (Mecca). Institutionally, the economy had developed advanced international trade networks and global monetary bimetallism, but operated without a universal state legal authority. The absence of centralized moral regulation enabled exploitative practices, including usury, speculation (gharar), and monopoly. Nevertheless, market continuity was maintained through tribal institutions such as the two-season trade journey (Rihlah), security pacts (Ilaf), and truces during the Sacred Months. The study concludes that Islam emerged within an established commercial culture and subsequently reformed its institutions by preserving productive traditions while eliminating oppressive transactional practices.*

Keywords*: Arabian Historiography; Caravan Trade; Economic Model Concepts; Economic Systems; Pre-Islamic Economy.*

Abstrak. Historiografi populer sering kali menyederhanakan Jazirah Arab pra-Islam sebagai wilayah gurun pasir yang statis dan terisolasi dengan label "Zaman Jahiliyah." Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi narasi tersebut dengan menganalisis secara mendalam dinamika ekonomi Arab kuno sebelum abad ke-7 Masehi. Melalui pendekatan historis-kualitatif dan studi kepustakaan (library research), penelitian ini membedah interaksi antara variasi ekologis, struktur institusi pasar, dan norma kultural lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi pra-Islam dibentuk oleh tiga konsep model ekonomi yang heterogen namun saling terintegrasi: pastoral-nomadik (Badui pedalaman), agraris-oase (Yaman dan Yatsrib), serta komersial-kafilah (Mekkah). Secara kelembagaan, sistem ekonomi saat itu telah mencapai kemajuan teknis tinggi melalui jaringan niaga internasional dan bimetalisme moneter global, namun berjalan tanpa otoritas negara hukum yang universal. Ketiadaan regulasi moral tersentralisasi melahirkan ekosistem kapitalisme primitif yang eksploitatif dengan legalitas praktik riba, spekulasi (gharar), dan monopoli. Kendati demikian, kontinuitas roda pasar berhasil dipertahankan berkat tradisi ekonomi era pra-Islam yang melekat kuat (embedded) pada institusi kesukuan, seperti tradisi perjalanan niaga dua musim (Rihlah), pakta keamanan (Ilaf), dan gencatan senjata pada Bulan Haram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak lahir di ruang hampa yang miskin budaya niaga, melainkan hadir sebagai reformator kelembagaan yang menata ulang tradisi produktif sekaligus mengikis sistem transaksional yang menindas.

Kata kunci: Ekonomi Pra-Islam; Historiografi Arab; Konsep Model Ekonomi; Perdagangan Kafilah; Sistem Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Historiografi populer sering kali menggambarkan Jazirah Arab sebelum abad ke-7 Masehi sebagai wilayah gurun pasir yang statis, terisolasi, dan tertinggal. Label "Zaman Jahiliyah" juga kerap dipahami secara menyeluruh, seolah-olah menegasikan adanya perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sebelum kedatangan Islam. Padahal, masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan keragaman pola kehidupan, mulai dari kelompok

Naskah Masuk: 14 Agustus 2026; Revisi: 11 September 2026; Diterima: 09 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

nomadik hingga komunitas menetap dengan sistem kebudayaan yang berkembang sesuai kondisi wilayahnya (Rahmadani et al., 2024). Jazirah Arab juga berada dalam lingkungan geopolitik yang berhubungan dengan kekuatan dan jaringan ekonomi di sekitarnya, termasuk Bizantium dan Sasanian (Al-Jallad, 2024; Danielson, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dibentuk oleh variasi geografis, mobilitas, dan hubungan antarkawasan yang menghasilkan corak ekonomi yang beragam.

Secara ekologis, wilayah pedalaman gurun mendorong berkembangnya pola kehidupan pastoral-nomadik berbasis peternakan, sedangkan kawasan yang memiliki akses air memungkinkan berkembangnya pertanian dan permukiman yang lebih menetap. Yaman dan Yatsrib, misalnya, memiliki kegiatan agraris yang ditopang oleh kondisi lingkungan dan akses terhadap sumber air (Metwaly & Alshami, 2026; Reza-ur-rahīm, 2024). Sementara itu, Mekkah berkembang sebagai salah satu pusat kegiatan komersial yang memanfaatkan jaringan perdagangan dan mobilitas kafilah. Aktivitas tersebut didukung oleh tradisi perjalanan niaga, jaringan keamanan, dan hubungan antarkelompok yang membantu mempertahankan perdagangan Quraisy (Al-Saedi & Kanna, 2025; Apipudin & Fazlin, 2026). Pasar musiman seperti Ukaz, Majannah, dan Dzul Majaz kemudian menjadi bagian dari ruang pertukaran ekonomi dan sosial yang berlangsung dalam kerangka tradisi masyarakat Arab pra-Islam (Siddique, 2024).

Meskipun aktivitas perdagangan telah menghubungkan berbagai kawasan, Jazirah Arab pra-Islam belum memiliki satu otoritas hukum negara yang berlaku secara universal di seluruh semenanjung. Hubungan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh norma kesukuan, kesepakatan antarkelompok, serta posisi sosial para pelaku perdagangan (Al-Janabi & Khalaf Al-Jubouri, 2022). Dalam lingkungan tersebut, dikenal berbagai bentuk transaksi dan pembiayaan yang kemudian mendapat perhatian serta penataan kembali dalam perkembangan ekonomi Islam, termasuk persoalan riba dan praktik transaksi yang mengandung ketidakpastian. Namun, aktivitas ekonomi pra-Islam tidak tepat apabila hanya dipahami dari sisi praktik transaksional yang bermasalah karena keberlangsungan pasar juga membutuhkan kepercayaan, jaminan keamanan, dan aturan sosial. Pasar-pasar pra-Islam menunjukkan adanya mekanisme pengelolaan dan kebiasaan tertentu yang membantu menciptakan ruang perdagangan bagi kelompok yang berbeda (Siddique, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara perkembangan jaringan transaksi dan struktur kelembagaan yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat telah mengenal pasar, rute perdagangan, instrumen pertukaran, serta mekanisme kerja sama yang memungkinkan barang dan pelaku ekonomi bergerak melintasi

wilayah (Abi & Norfu'adi, 2023). Penggunaan uang dan aktivitas perdagangan bahkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi sebelum dan pada masa awal pemerintahan Islam (Jamil, 2021). Pada konteks Mekkah, keberlangsungan aktivitas komersial tidak hanya berkaitan dengan posisi geografis, tetapi juga dengan jaringan keamanan dan hubungan sosial-politik yang mendukung perdagangan Quraisy (Al-Saedi & Kanna, 2025; Apipudin & Fazlin, 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara konsep model ekonomi, sistem ekonomi, dan tradisi ekonomi era pra-Islam dalam membentuk corak ekonomi masyarakat Arab sebelum munculnya pembaruan kelembagaan Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Model Ekonomi Era Pra-Islam

Konsep model ekonomi digunakan sebagai kerangka untuk membaca corak produksi, distribusi, dan konsumsi suatu masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam sejarah ekonomi, pola tersebut tidak terbentuk secara tunggal karena kondisi geografis, ketersediaan sumber daya, mobilitas penduduk, dan hubungan antarkomunitas memengaruhi pilihan kegiatan ekonomi. Kerangka embedded economy dari Polanyi (1957) membantu menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat pra-modern tidak dapat dipisahkan secara tegas dari institusi sosial, politik, dan budaya. Kajian mutakhir tentang Arabia pra-Islam juga menekankan keragaman komunitas, identitas, dan bentuk kehidupan sosial, sehingga pembacaan ekonomi yang hanya berpusat pada gambaran masyarakat gurun menjadi kurang memadai (Grasso, 2023). Dengan demikian, konsep model ekonomi dalam penelitian ini dipakai untuk mengidentifikasi variasi kegiatan ekonomi sekaligus hubungan fungsional antarruang di Jazirah Arab.

Dalam kerangka tersebut, model ekonomi masyarakat pra-Islam dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk utama tanpa menganggap ketiganya sebagai sistem yang sepenuhnya terpisah. Pertama, model subsisten-pastoral bertumpu pada peternakan berpindah di wilayah bercurah hujan rendah, dengan ternak berfungsi sebagai sumber pangan, sarana mobilitas, aset ekonomi, dan dalam kondisi tertentu media pertukaran. Kedua, model agraris-oase berkembang pada komunitas menetap yang memiliki akses air, sehingga produksi pangan, perkebunan, dan pengelolaan lahan dapat berlangsung lebih intensif. Ketiga, model komersial-merkantil kuno berkembang terutama pada pusat-pusat perkotaan dan jalur perdagangan yang memanfaatkan posisi geografis untuk menghubungkan komoditas antarkawasan. Ketiga bentuk tersebut saling berhubungan karena komunitas pastoral, agraris, dan pedagang

membutuhkan pertukaran barang, jasa, transportasi, serta akses terhadap pasar yang sama (Metwaly & Alshami, 2026; Naji, 2025).

Hubungan antara ketiga model tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Jazirah Arab tidak dapat dijelaskan melalui satu corak produksi saja. Komunitas pastoral menyediakan ternak dan jasa mobilitas, komunitas agraris menghasilkan bahan pangan dan komoditas perkebunan, sedangkan pusat perdagangan menghubungkan surplus antardaerah dengan pasar yang lebih luas. Pola ini membentuk ketergantungan fungsional antarzona ekologis, terutama ketika kebutuhan suatu wilayah tidak dapat dipenuhi hanya dari sumber daya lokal. Bukti epigrafis pada jalur di utara Ṭāʾif turut menunjukkan keberadaan rute dan mobilitas antarkawasan di Arabia pra-Islam (Al-Jallad & Sidky, 2022). Analisis spasial terbaru terhadap jaringan permukiman dan jalur menuju Yatsrib memperkuat pentingnya hubungan antara lokasi, akses, dan konektivitas dalam membaca dinamika ekonomi kawasan (Metwaly & Alshami, 2026). Karena itu, integrasi antarmodel menjadi dasar penting untuk memahami mengapa ekonomi pra-Islam dapat berkembang meskipun kondisi ekologis Jazirah Arab sangat beragam.

Sistem Ekonomi Era Pra-Islam

Sistem ekonomi mengacu pada aturan, institusi, dan mekanisme yang mengatur hubungan transaksional antaraktor ekonomi. Dalam kerangka embedded economy, aktivitas ekonomi masyarakat pra-modern melekat pada struktur sosial dan tidak selalu bergantung pada regulasi negara formal yang tersentralisasi (Polanyi, 1957). Pada masyarakat Arab pra-Islam, aturan transaksi berkaitan erat dengan adat kabilah, status sosial, hubungan antarsuku, serta kesepakatan yang menjamin akses terhadap pasar dan jalur perjalanan. Kondisi sosial masyarakat Yatsrib dan wilayah Arab lainnya juga memperlihatkan bahwa organisasi komunitas memiliki peran penting dalam membentuk hubungan ekonomi dan sosial (Iqbal, 2024). Oleh sebab itu, sistem ekonomi pra-Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai tatanan kelembagaan yang menggabungkan mekanisme pasar dengan norma dan otoritas sosial nonformal.

Secara analitis, karakteristik kelembagaan sistem ekonomi pra-Islam dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama. Pertama, dualisme keuangan moneter terlihat dari penggunaan mata uang asing, terutama dinar emas Bizantium dan dirham perak Sasanian, ketika belum terdapat otoritas tunggal di Jazirah Arab yang mencetak mata uang untuk seluruh kawasan; nilai transaksi juga berkaitan dengan kandungan dan berat logam (Grierson, 1999). Kedua, akses terhadap modal, jaringan, dan pasar tidak tersebar secara merata karena kelompok pedagang dan elite suku memiliki posisi sosial yang lebih kuat dalam mengendalikan sumber daya

ekonomi. Ketiga, sistem kredit dan pembiayaan mengenal utang berbunga dan praktik transaksi yang kemudian dikategorikan dalam literatur Islam sebagai riba, gharar, dan maysir. Kajian mengenai perdagangan dan uang pada masa sebelum dan awal pemerintahan Islam menegaskan bahwa aktivitas niaga dan penggunaan alat transaksi telah memiliki arti strategis bagi perkembangan ekonomi Mekkah (Jamil, 2021).

Tradisi ekonomi era pra-Islam mencakup kebiasaan, norma sosial, dan mekanisme kolektif yang membantu menjaga sirkulasi barang ketika otoritas politik belum terpusat. Tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan jual beli, tetapi juga dengan keamanan perjalanan, kalender sosial-keagamaan, dan hubungan diplomatik antarsuku. Pasar, perjalanan kafilah, dan ritual keagamaan sering berada dalam ruang sosial yang saling berkaitan, terutama di Mekkah dan pusat-pusat perdagangan musiman (Alqaser, 2025). Karena itu, tradisi ekonomi dapat dipahami sebagai institusi nonformal yang mengurangi sebagian risiko perdagangan dan menyediakan pola interaksi yang relatif dapat diprediksi. Peran tradisi tersebut menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana aktivitas niaga tetap berlangsung di tengah fragmentasi politik Jazirah Arab.

Tiga tradisi utama dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi kelembagaan tersebut dalam bentuk naratif. Pertama, tradisi Rihlah merujuk pada mobilitas kafilah dagang yang menghubungkan Mekkah dengan wilayah selatan dan utara, sehingga membantu kesinambungan arus komoditas dan hubungan niaga antarkawasan (Tuncer, 2023). Kedua, tradisi Ilaf berfungsi sebagai pakta proteksi dan kerja sama yang mendukung keamanan perjalanan serta memperkuat jaringan Quraisy dengan kelompok-kelompok di sepanjang rute perdagangan; penelitian terbaru menempatkan Ilaf sebagai bagian dari strategi politik dan keamanan perdagangan Quraisy (Apipudin & Fazlin, 2026). Ketiga, pasar musiman seperti Ukaz, Majannah, dan Dzul Majaz memperoleh dukungan dari kalender Bulan Haram yang membatasi konflik pada waktu tertentu dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertemuan antarkelompok. Dengan demikian, Rihlah, Ilaf, dan Suq bukan sekadar kebiasaan terpisah, tetapi membentuk perangkat sosial yang menopang mobilitas, keamanan, dan pertukaran ekonomi (Alqaser, 2025; Siddique, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi secara kritis dan sistematis fenomena masa lampau yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Jazirah Arab sebelum abad ke-7 Masehi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk

menafsirkan informasi dalam teks sejarah dan literatur ilmiah, bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik. Fokus analisis diarahkan pada keterkaitan antara model ekonomi, sistem ekonomi, dan tradisi ekonomi era pra-Islam. Tahapan interpretasi mengikuti prinsip analisis kualitatif yang menekankan reduksi, pengorganisasian, pembacaan pola, dan penarikan kesimpulan secara terkontrol (Miles et al., 2014).

Data penelitian berasal dari sumber sekunder ilmiah yang relevan dengan ekonomi dan masyarakat Arab pra-Islam. Sumber tersebut dikelompokkan menjadi pustaka utama kajian dan pustaka pendukung. Pustaka utama mencakup karya historiografi, kajian jalur perdagangan, numismatik, serta penelitian yang membahas Mekkah, Yatsrib, Yaman, pasar, dan jaringan kafilah. Pustaka pendukung meliputi buku sejarah peradaban Islam, artikel jurnal mengenai ekonomi Islam dan muamalah klasik, serta literatur sosiologi-ekonomi pra-modern. Pemilihan sumber mempertimbangkan kesesuaian topik, kejelasan informasi bibliografis, relevansi periode, dan kontribusinya terhadap tiga fokus analisis penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan tahapan pelacakan, pemilihan, pencatatan, dan pengelompokan sumber. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan ke dalam tema model ekonomi, sistem kelembagaan, instrumen moneter, perdagangan, dan tradisi ekonomi. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan kritik historis untuk membandingkan informasi, menemukan pola yang berulang, serta menilai keterkaitan antar-temuan. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif-deskriptif, dan penarikan kesimpulan sebagaimana kerangka (Miles et al., 2014). Hasil interpretasi selanjutnya dibandingkan dengan literatur mutakhir agar pembahasan tidak hanya mengulang deskripsi historis, tetapi juga menunjukkan hubungan antara kondisi ekologis, institusi, dan jaringan perdagangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Konsep Model Ekonomi Berdasarkan Ruang Ekologis

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa model ekonomi era pra-Islam terfragmentasi secara geografis, tetapi terhubung secara fungsional melalui mobilitas manusia dan pertukaran komoditas. Rekonstruksi spasial memperlihatkan bahwa perbedaan akses air, kondisi lahan, dan posisi terhadap rute perdagangan menghasilkan corak ekonomi yang berbeda antarkawasan. Temuan ini mendukung pembacaan bahwa Jazirah Arab bukan satu ruang ekonomi yang homogen. Sebaliknya, setiap zona memiliki basis produksi dan fungsi ekonomi yang berbeda, lalu saling berhubungan melalui pasar dan jalur perjalanan (Shuaib, 2024). Analisis jaringan menuju Yatsrib juga menunjukkan pentingnya konektivitas

permukiman dan rute dalam menjelaskan hubungan ekonomi kawasan (Metwaly & Alshami, 2026).

Pertama, model pastoral-nomadik terutama berkembang pada kawasan Arab Utara dan Tengah yang memiliki keterbatasan sumber air dan lahan pertanian. Dalam kondisi tersebut, ternak seperti unta dan domba menjadi aset produktif karena menyediakan pangan, bahan baku, dan dukungan mobilitas. Unta juga memiliki fungsi penting dalam perjalanan jarak jauh karena mampu mendukung pergerakan manusia dan barang di lingkungan gurun. Pola produksi ini membuat kekayaan tidak hanya terkait dengan tanah, tetapi juga dengan kepemilikan ternak dan kemampuan mempertahankan mobilitas kelompok. Temuan tersebut sejalan dengan gambaran keragaman mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam yang menempatkan peternakan sebagai salah satu basis ekonomi penting di luar pusat agraris dan perdagangan (Sumarno et al., 2025).

Kedua, model agraris-oase berkembang pada wilayah yang memiliki akses air dan memungkinkan komunitas hidup lebih menetap. Yaman memiliki tradisi pertanian yang lebih kuat dibandingkan banyak kawasan gurun, sedangkan Yatsrib dan Thaif berkembang melalui pemanfaatan oase dan lahan produktif. Komoditas pertanian tidak hanya berfungsi untuk konsumsi lokal, tetapi juga memasuki jaringan pertukaran dengan komunitas lain yang tidak memiliki kapasitas produksi serupa. Literatur terbaru mengenai pertanian pra-Islam menunjukkan bahwa aktivitas agraris merupakan unsur penting dalam keragaman ekonomi Jazirah Arab dan tidak dapat ditempatkan sebagai sektor pinggiran semata (Reza-ur-rahīm, 2024). Analisis spasial terhadap Yatsrib juga memperlihatkan hubungan antara pola permukiman, akses jalur, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pada kawasan oase (Metwaly & Alshami, 2026).

Ketiga, model komersial-kafilah berkembang kuat di Hijaz, terutama Mekkah, yang memiliki keterbatasan sumber daya pertanian tetapi berada dalam jaringan pergerakan antarkawasan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat Quraisy mengembangkan aktivitas perdagangan, kemitraan, dan jaringan keamanan untuk mempertahankan mobilitas komoditas. Kajian mengenai kehidupan ekonomi Mekkah menegaskan peran lokasi geografis dan rute kafilah dalam membentuk mata pencaharian masyarakatnya (Al-Saedi & Kanna, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa dominasi komersial Quraisy tidak hanya terkait dengan posisi geografis, tetapi juga dengan strategi politik, keamanan, dan pemanfaatan legitimasi sosial-keagamaan (Apipudin & Fazlin, 2026). Dengan demikian, kekuatan model komersial Mekkah terletak pada kemampuan menghubungkan jaringan, membangun

keamanan, dan mengelola hubungan antarkelompok, bukan semata-mata pada ketersediaan komoditas lokal.

Anatomi Kelembagaan Sistem Ekonomi Pra-Islam

Analisis terhadap komponen transaksional menunjukkan bahwa sistem ekonomi pra-Islam bekerja melalui kombinasi mekanisme pasar dan institusi kesukuan. Tidak adanya satu pemerintahan tersentralisasi untuk seluruh Jazirah Arab membuat perlindungan transaksi sangat bergantung pada norma lokal, reputasi, dan kekuatan jaringan sosial. Dalam konteks Mekkah, elite pedagang memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, informasi, dan hubungan antarkawasan sehingga posisi tawar mereka relatif kuat. Namun, temuan tentang pasar pra-Islam juga menunjukkan adanya bentuk pengaturan dan kebiasaan yang membantu perdagangan tetap berjalan, sehingga sistem tersebut tidak tepat dipahami sebagai pasar yang sama sekali tanpa aturan (Siddique, 2024). Hasil ini memperkuat argumen bahwa kelembagaan ekonomi pra-Islam bersifat informal, terfragmentasi, dan bertumpu pada relasi sosial, tetapi tetap mampu menghasilkan keteraturan tertentu dalam aktivitas niaga.

Dalam aspek moneter, masyarakat Arab menggunakan mata uang yang berasal dari kekuatan politik di sekitarnya, terutama dinar emas Bizantium dan dirham perak Sasanian. Penggunaan mata uang asing menunjukkan keterhubungan ekonomi Jazirah Arab dengan jaringan perdagangan yang lebih luas, meskipun belum terdapat otoritas moneter tunggal yang berlaku untuk seluruh kawasan. Dalam transaksi, berat dan kandungan logam memiliki arti penting karena nilai alat tukar berkaitan dengan material yang dikandungnya (Grierson, 1999). Kajian Jamil (2021) juga menempatkan uang dan perdagangan sebagai unsur strategis dalam aktivitas ekonomi Mekkah sebelum dan pada awal pemerintahan Islam. Dengan demikian, sistem moneter pra-Islam memperlihatkan kemampuan adaptasi terhadap instrumen pertukaran eksternal sekaligus menunjukkan belum terbentuknya standardisasi moneter yang tersentralisasi.

Pada sisi pembiayaan, literatur historis menunjukkan adanya praktik utang dan hubungan kredit yang dapat menempatkan debitur dalam posisi rentan. Riba al-Nasi’ah menggambarkan mekanisme penambahan kewajiban ketika pembayaran ditunda, sehingga beban debitur dapat meningkat dari waktu ke waktu. Ketimpangan akses terhadap modal memperbesar perbedaan posisi tawar antara pemilik sumber daya dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Kajian tentang struktur sosial Arabia juga mengingatkan bahwa status sosial dan hubungan ketergantungan perlu dianalisis secara hati-hati karena bukti epigrafis tidak selalu mendukung generalisasi sederhana tentang bentuk subordinasi di seluruh wilayah (Grasso, 2023). Oleh karena itu, praktik kredit pra-Islam lebih tepat dipahami dalam

konteks struktur sosial dan kelembagaan yang beragam, sambil tetap mengakui risiko eksploitasi ketika perlindungan terhadap pihak yang lemah terbatas.

Selain pembiayaan, literatur Islam klasik mengenal sejumlah bentuk transaksi pra-Islam yang kemudian dikritik karena mengandung ketidakjelasan atau ketimpangan informasi. Bay' al-Mulamasah dan Bay' Habal al-Habalah sering digunakan sebagai contoh transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian mengenai objek atau kualitas barang. Dari sudut kelembagaan, persoalan utama pada praktik semacam ini terletak pada keterbatasan informasi dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan jaringan perdagangan tidak selalu berjalan seiring dengan standardisasi kontrak dan perlindungan transaksi. Karena itu, perkembangan ekonomi pra-Islam perlu dinilai melalui dua sisi sekaligus, yaitu kapasitas pasar untuk memperluas pertukaran dan keterbatasan aturan dalam menjamin keadilan kontraktual.

Dinamika Tradisi Ekonomi Era Pra-Islam sebagai Stabilisator Pasar

Meskipun otoritas politik bersifat terfragmentasi, perdagangan Arab pra-Islam tetap dapat berlangsung karena masyarakat mengembangkan mekanisme sosial untuk mengurangi risiko perjalanan dan transaksi. Tradisi ekonomi berfungsi sebagai institusi nonformal yang membentuk ekspektasi mengenai waktu, tempat, dan tata hubungan perdagangan. Pasar musiman menyediakan ruang pertemuan antarkelompok, sedangkan kesepakatan keamanan membantu mengurangi ancaman terhadap kafilah (Shuaib, 2024). Siddique (2024) menunjukkan bahwa pasar pra-Islam memiliki sistem dan praktik pengelolaan yang berkaitan dengan kebutuhan perdagangan masyarakat di berbagai kawasan. Dengan demikian, stabilitas pasar tidak semata-mata berasal dari otoritas negara, tetapi juga dari kebiasaan kolektif dan perjanjian sosial yang diakui oleh komunitas.

Tradisi Ilaf menjadi salah satu mekanisme penting yang menghubungkan perdagangan dengan diplomasi antarsuku. Melalui kesepakatan ini, jaringan Quraisy memperoleh dukungan keamanan dan akses yang membantu pergerakan kafilah melewati wilayah yang dikuasai kelompok berbeda. Bagi kelompok yang terlibat, hubungan tersebut juga dapat membuka akses terhadap barang, keuntungan perdagangan, atau hubungan ekonomi dengan pusat niaga. Kajian terbaru menempatkan Ilaf sebagai bagian dari strategi politik dan keamanan yang memperkuat dominasi komersial Quraisy pada jalur utara-selatan Arabia (Al Shuwaier, 2023; Apipudin & Fazlin, 2026). Oleh sebab itu, Ilaf dapat dipahami bukan hanya sebagai pakta perlindungan,

tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan yang menurunkan biaya sosial dan risiko dalam perdagangan jarak jauh.

Tradisi Rihlah melengkapi fungsi Ilaf melalui pola perjalanan dagang yang menghubungkan Mekkah dengan kawasan selatan dan utara. Mobilitas kafilah memungkinkan pedagang mengakses komoditas dari wilayah yang berbeda sekaligus memperluas jaringan pemasaran. Tuncer (2023) menunjukkan pentingnya istilah perdagangan dan perjalanan dalam konteks sejarah niaga yang berkaitan dengan Mekkah dan tradisi sirah. Pola perjalanan tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas komersial membutuhkan pengetahuan mengenai musim, rute, mitra, dan kondisi keamanan. Dengan demikian, Rihlah dapat dibaca sebagai praktik ekonomi yang menggabungkan mobilitas, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan jaringan lintas wilayah.

Jaringan perdagangan tersebut bertemu dengan tradisi pasar musiman yang terintegrasi dengan kalender sosial-keagamaan di sekitar Mekkah. Pada periode Bulan Haram, pembatasan konflik menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi perjalanan, pertemuan antarsuku, dan transaksi di pasar regional seperti Ukaz, Majannah, dan Dzul Majaz. Pasar tidak hanya menjadi lokasi pertukaran komoditas, tetapi juga ruang pertemuan sosial, penyelesaian hubungan antarkelompok, dan aktivitas budaya. Alqaser (2025) menunjukkan adanya keterkaitan antara perdagangan dan dimensi keagamaan dalam masyarakat Arab pra-Islam, sedangkan Siddique (2024) menekankan pentingnya pasar dalam sistem perdagangan kawasan. Hasil ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan, keamanan, dan ekonomi saling beririsan dalam membentuk kelembagaan pasar pra-Islam dan membantu menjelaskan keberlanjutan perdagangan tanpa otoritas negara yang sepenuhnya tersentralisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam tidak bersifat tunggal, statis, maupun terisolasi. Struktur ekonomi berkembang melalui keterkaitan tiga model utama, yaitu pastoral-nomadik di wilayah pedalaman, agraris-oase pada kawasan yang memiliki sumber air dan lahan produktif, serta komersial-kafilah yang berkembang terutama di pusat perdagangan seperti Mekkah. Perbedaan kondisi ekologis membentuk corak produksi yang berbeda, tetapi ketiganya saling terhubung melalui pertukaran komoditas, mobilitas penduduk, dan jaringan perdagangan antarkawasan. Sistem ekonomi pada masa tersebut juga telah mengenal pasar, instrumen pertukaran, kredit, dan hubungan perdagangan lintas wilayah, meskipun belum berada di bawah satu otoritas hukum yang berlaku secara universal. Keberlangsungan aktivitas ekonomi banyak ditopang oleh norma kesukuan,

kepercayaan, perjanjian keamanan, dan tradisi sosial yang berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan nonformal.

Tradisi Rihlah, Ilaf, pasar musiman, dan penghormatan terhadap Bulan Haram menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam telah memiliki mekanisme sosial untuk mendukung mobilitas dan keamanan perdagangan. Namun, struktur tersebut masih memiliki keterbatasan karena perlindungan dalam transaksi sangat dipengaruhi oleh kekuatan suku, status sosial, dan posisi ekonomi para pelakunya. Berdasarkan temuan tersebut, kedatangan Islam dapat dipahami bukan sebagai pembentukan aktivitas ekonomi dari kondisi yang sepenuhnya kosong, tetapi sebagai proses pembaruan kelembagaan terhadap praktik ekonomi yang telah berkembang sebelumnya. Unsur ekonomi yang mendukung perdagangan dan pertukaran tetap berlanjut, sedangkan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan memperoleh penataan dan pembatasan yang lebih jelas. Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan sumber epigrafi, numismatik, arkeologi, dan analisis spasial agar rekonstruksi ekonomi Arab pra-Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada sumber kepustakaan sekunder.

DAFTAR REFERENSI

Abi, N. N., & Norfu'adi, M. (2023). Socio-Economic Conditions of the Arabian Peninsula Before Islam. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, *3*(6), 849–855. https://doi.org/10.35877/soshum2388

Al-Jallad, A. (2024). Valentina Grasso, Pre-Islamic Arabia: Politics, cults and identities during Late Antiquity: A review article. *Journal of Semitic Studies*, *69*(1), 687–705. https://doi.org/10.1093/jss/fgad046

Al-Jallad, A., & Sidky, H. (2022). A Paleo-Arabic inscription on a route north of Ṭāʾif. *Arabian Archaeology and Epigraphy*, *33*(1), 202–215. https://doi.org/10.1111/aae.12203

Al-Janabi, H. S. M., & Khalaf Al-Jubouri, F. N. I. (2022). The economic reality Mecca before Islam. *Journal of Tikrit University for Humanities*, *29*(8, Part 2), 158–174. https://doi.org/10.25130/jtuh.29.8.2.2022.09

Al-Saedi, A. S., & Kanna, E. N. A. (2025). Aspects of economic life in Mecca before Islam. *Humanities and Educational Sciences Journal*, (48), 325–352. https://doi.org/10.55074/hesj.vi48.1486

Al Shuwaier, M. A. (2023). The Commercial Crisis in Makkah after the Prophet's Hijra AH 1-8/622–629 CE. *Darah Journal of Arabian Peninsula Studies*, *1*(1), 18–47. https://doi.org/10.1163/29501768-2023xx04

Alqaser, K. H. A. (2025). Trade and the religious dimension in pre-Islamic Arab society: A historical review in the light of selected models. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, *6*(4), 523–527. https://doi.org/10.51699/cajssh.v6i4.1231

Apipudin, A., & Fazlin, T. (2026). Quraysh commercial dominance: Political and security strategies on the Arabian North-South trade route. *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab, 23*(1). https://doi.org/10.20956/jna.v23i1.48630

Danielson, A. J. (2023). Trade, kingdom, and empire: Edom and the South Arabian trade. *Journal of Ancient Near Eastern History*, *10*(1), 139–175. https://doi.org/10.1515/janeh-2022-0007

Grasso, V. A. (2023). Slavery in first millennium Arabia: Epigraphy and the Qurʾān. *Millennium, 20*(1), 65–89. https://doi.org/10.1515/mill-2023-0005

Grierson, P. (1999). *Byzantine coinage*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection. https://books.google.com/books?id=Q9hpostaTU8C

Iqbal, H. F. (2024). Kondisi sosial masyarakat Madinah pra Islam. *JSI: Jurnal Sejarah Islam, 3*(1), 35–48. https://doi.org/10.24090/jsij.v3i1.10249

Jamil, I. (2021). Signifikansi perdagangan dan uang sebagai media transaksi dalam konteks kebijakan moneter pada masa sebelum dan awal pemerintahan Islam. *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 1*(1), 49–56. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1653

Metwaly, M., & Alshami, A. (2026). Tracing the pathways to Yathrib (Al-Madinah): A GIS-based analysis of settlement patterns and ancient trade networks. *PLOS ONE*, *21*(5), e0348677. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0348677

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.

Naji, H. M. H. (2025). Economic life in the Arabian Peninsula during the sixth and seventh centuries AD: Trade as a model. *Sana'a University Journal of Human Sciences*, *4*(7), 142–161. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i7.1716

Polanyi, K. (1957). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. https://www.beacon.org/The-Great-Transformation-P2237.aspx

Rahmadani, R., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Studi sistem-sistem kebudayaan masyarakat Arab pra Islam. *Journal of Human and Education*, *4*(6), 1222–1232. https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1973

Reza-ur-rahīm, M. (2024). İslam öncesi Arabistan'da tarım. *Akademik Siyer Dergisi*, (Cahiliye Özel Sayısı), 200–213. https://doi.org/10.47169/samer.1490339

Shuaib, M. bin G. (2024). The Ports of the Eastern Red Sea Before Islam: A Historical and Cultural Study. *Darah Journal of Arabian Peninsula Studies*, *2*(1), 120–149. https://doi.org/10.1163/29501768-20240104

Siddique, M. A. (2024). Pre-Islamic markets in Arabian Peninsula and their management system: A historical overview. *Mujalla Islami Fikr-o-Tahzeeb*, *4*(1), 88–100. https://doi.org/10.32350/mift.41.06

Sumarno, W. F., Sodikin, A., & Virdaus, D. R. (2025). Perkembangan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Arab dari pra-Islam hingga datangnya Islam. *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 4*(1), 72–84. https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2492

Tuncer, F. (2023). The terms trade (Tijarah) and road (Rihlah) in Qur'anic context: With special references to the trade of Prophet Muhammad in Sirah. *Religions*, *14*(8), 1055. https://doi.org/10.3390/rel14081055